



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Muhammad Lutfi Hamid**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA**
3. NHK : **452327**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.244.000.000
------------------------------	------------	----------------------

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/250 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 2.040.000.000
2. Tanah Seluas 516 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 774.000.000
3. Tanah Seluas 1.816 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 2.750.000.000
4. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	59.950.000
---------------------------------------	------------	-------------------

1. MOTOR, Honda E1F02N11M2 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 5.950.000
2. MOTOR, Honda NF12A1C M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALTIS G MT 2006 Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 49.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	755.532.000
----------------------------------	------------	--------------------

D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
--------------------------	------------	-------------

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	61.355.500
------------------------------	------------	-------------------

F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.000.000
-------------------------	------------	------------------



Sub Total	Rp.	7.122.837.500
III. HUTANG	Rp.	225.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.897.837.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.